

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

The Universal Declaration of Human Rights menyebutkan bahwa:

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and high education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Pernyataan di atas sesuai dengan bunyi Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 menegaskan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja sama

dengan pihak swasta dan masyarakat. Pelayanan pendidikan harus mampu mengadakan perubahan yang lebih mementingkan kepentingan seluruh warga masyarakat selaku stakeholders sekolah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah bersama dengan DPR dan DPRD agar menindaklanjuti UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas disertai dengan pengembangan berbagai produk hukum lainnya.

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan yang diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang sering mengalami ketidakpastian. Dalam kerangka inilah, pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, berkembang menuju wawasan global atau *go international*.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, sehingga manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Begitu pentingnya pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia, maka pemerintah telah melahirkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) dikemukakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa: "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bekal kepada peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang, yang bermuatan nilai-nilai agama dan kebudayaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan haruslah dilaksanakan secara sistematis dan terorganisasi, untuk memudahkan pencapaian tujuannya. Siregar (2002: 33) mengemukakan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh suatu badan dengan tujuan tertentu. Badan ini mungkin pihak swasta, mungkin pihak agama, atau mungkin pemerintah. Tujuannya tergantung pada pihak yang menyelenggarakan. Bila penyelenggaranya adalah pihak agama, maka tujuan utamanya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan menambah pengetahuan tentang agama. Bila pemerintah yang menyelenggarakannya, maka tujuan utamanya sangat bervariasi karena tugas pemerintah itu sangat luas

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan antara lain mengenai orientasi pendidikan, yang dikenal dengan sebutan 4 (empat) strategi kebijakan pokok pendidikan yang meliputi:

- 1) Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi,
- 2) Peningkatan mutu pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan,

- 3) Kesesuaian dan kesepadanan antara lulusan sekolah dengan lapangan kerja, dan
- 4) Efisiensi dalam pendidikan.

Keempat orientasi pendidikan tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan mutu/kinerja sumber daya manusia Indonesia, agar memiliki kecerdasan, keterampilan, kualitas kerja, profesional dan produktif. Dengan demikian, akan tercipta manusia yang bermutu dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berorientasi pada peningkatan penguasaan iptek, kemampuan profesional dan produktivitas kerja yang dituntut oleh kebutuhan pembangunan. Dengan karakteristik mutu sumber daya manusia yang demikian, maka bangsa Indonesia diharapkan mampu bersaing dalam era globalisasi.

Salah satu strategi kebijakan pokok adalah peningkatan mutu pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan melalui berbagai cara, baik perbaikan kurikulum dan silabus yang relevan dengan kebutuhan lapangan, perbaikan sarana prasarana, peningkatan profesionalisme guru melalui peningkatan jenjang pendidikan maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya lain yang mampu memberikan stimulus bagi guru, seperti adanya *reward* dan *punishment* atau meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji pokok maupun tunjangan.

Visi Depdiknas yang dituangkan dalam dua buah kata yang sederhana, yakni 'cerdas' dan 'kompetitif' itu dicanangkan untuk menghadapi persaingan global. Disadari sepenuhnya, bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dan menguntungkan untuk dapat memanfaatkan teknologi baru dan memasarkan barang-barang hasil teknologinya. Sementara itu, secara demografis, struktur angkatan kerja

Indonesia masih didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikannya tidak lebih dari SD 6 tahun. Keadaan ini sangat kondusif bagi Indonesia dalam memasuki era perdagangan bebas yang secara bertahap berlaku mulai tahun 2003 untuk kawasan Asia Tenggara (AFTA) dan tahun 2020 untuk kawasan Asia-Pasifik (APEC).

Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai salah satu lembaga pendidikan juga perlu diupayakan peningkatan kualitasnya agar mampu berkontribusi melahirkan tenaga kerja yang 'fresh' dan siap diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bugar. Sebagai institusi yang melaksanakan fungsi layanan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus mengupayakan terselenggaranya layanan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa khususnya pada jenjang SMA berupa terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu, mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dalam belajar serta ditunjang dengan pengelolaan manajemen yang akuntabel dan prima, diharapkan akan melahirkan pencitraan publik yang positif kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Dengan moto memberikan yang terbaik untuk meningkatkan layanan belajar di Kabupaten Bandung Barat, mengemban amanat serta tugas yang luas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat yaitu: "Terwujudnya pendidikan yang agamis, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing", serta misi sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan dan berkeadilan
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan yang agamis, berakhlak mulia dan cerdas

- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan
- 4) Meningkatkan daya saing pendidikan yang inovatif, kreatif, kompetitif dan profesional.

Namun dalam kenyataan di lapangan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil pemantauan sementara penulis dari tahun 2007 sampai dengan 2009, masih ada keluhan dari para orang tua siswa bahwa layanan pendidikan yang diberikan kurang memuaskan, pelaksanaan KBM kurang maksimal, penegakan disiplin kurang tegas, masih ada guru yang sering tidak masuk kelas, pengelolaan proses pembelajaran di kelas masih konvensional-tradisional. Di sisi lain, personil sekolah mengeluhkan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, sistem penghonoran yang masih perlu ditingkatkan, penataan ruangan kerja yang masih rendah, unsur-unsur di atas harus dapat dibenahi agar tercipta suasana kondusif personil sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tugas pokok dan fungsi suatu lembaga pendidikan tersebut akan berjalan dengan baik bila didukung dengan Sistem Pendukung Keputusan yang memadai. Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi sekarang ini memicu dunia pendidikan untuk turut menerapkan iptek dalam lingkungan organisasi mereka. Perkembangan teknologi informasi sudah merambah seluruh bidang, tidak hanya bidang komunikasi dan elektronik saja seperti yang sudah terjadi beberapa dekade ini, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu informasi dapat diperoleh dan disajikan secara cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Jika sekolah tidak mampu mengadakan Sistem Pendukung Keputusannya dengan canggih, maka sekolah tersebut akan tertinggal oleh organisasi lain. Menghadapi situasi demikian sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang handal dan menguasai teknologi informasi. Maksud dari sumber daya manusia yang handal adalah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian agar mempunyai kemampuan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang terpenting yang menentukan keberhasilan suatu sekolah.

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apa pun bentuk tujuannya. Sekolah dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan pelaksanaan misinya dikelola oleh manusia. Sekolah cenderung sudah mulai membaik dengan hadirnya teknologi informasi. Sekolah tersebut merasakan kepuasan adanya teknologi informasi, baik itu berbentuk *software*, *hardware*, maupun Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis teknologi yang canggih.

Untuk bisa mendukung sesuatu berbasis teknologi maka sumber daya manusia (SDM) harus memiliki keterampilan dan keahlian yang mempunyai

kemampuan dalam menggunakan Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis teknologi dengan penggunaan komputer yang serba canggih. Secanggih apapun teknologi dan rancangan yang ada tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh operator yang benar-benar menguasai Sistem Pendukung Keputusan sumber daya manusia. Keahlian profesional petugas akan dapat memberikan layanan informasi yang tepat dan baik untuk membantu memperlancar pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Mengingat begitu banyak hal yang diurus oleh institusi pendidikan mengakibatkan perlunya pengambilan keputusan penerimaan siswa untuk mendapatkan siswa yang sesuai dengan kriteria sekolah. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan Sistem Pendukung Keputusan dalam membantu pengumpulan data siswa seperti: data pendidikan, data usia, data jenis kelamin, dan lain-lain, untuk diproses dan kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Laporan tersebut memuat data atau informasi yang diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Pendukung Keputusan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan peningkatan Kinerja Kepala Sekolah.

Kebutuhan sekolah akan berbagai jenis informasi tidak dapat dihindari sehingga perlu dilakukan pengolahan data dengan baik, agar dihasilkan informasi yang memenuhi persyaratan ketepatan, kelengkapan dan dapat terkumpul, terolah juga tersimpan dengan baik. Dengan demikian, mudah ditelusuri dan disajikan apabila diperlukan guna mendukung proses pengambilan keputusan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sehingga Kinerja Kepala Sekolah dapat tercapai dengan baik.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menangani data untuk jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Secanggih apapun teknologi dan rancangan yang ada tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan unsur sumber daya manusianya yang benar-benar menguasai Sistem Pendukung Keputusan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya tentunya akan dapat memberikan layanan informasi, dan akan memperlancar pimpinan dalam mengambil keputusan karena didukung dengan data yang akurat, cepat dan aktual.

Sekolah sebagai institusi pendidikan selalu dihadapkan pada ledakan Sistem Pendukung Keputusan yang menuntut penanganan para ahli informasi dengan kemampuan dalam menguasai Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis teknologi yang canggih, sehingga membantu sekolah berkembang dengan pesat. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara penulis di SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada 13 Juli 2009, bahwa pelaksanaan Sistem Pendukung Keputusan sumber daya manusia di sekolah tersebut masih belum optimal.

Hal ini disebabkan pengambilan keputusan tidak berdasarkan basis data yang terdapat di sekolah tersebut yang menyebabkan Sistem Pendukung Keputusan kurang begitu akurat sehingga menyebabkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data yang akan diproses belum berjalan dengan baik, sehingga terkadang adanya keterlambatan dalam penyediaan data yang akan diproses. Hal ini disebabkan data yang diterima berjumlah banyak dan belum terklasifikasi dengan baik, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses data tersebut ke dalam Sistem Pendukung Keputusan sumber daya manusia.

- 2) Pengelolaan/pemrosesan data terjadi keterlambatan disebabkan sumber daya manusianya yang kurang begitu menguasai Program dengan Basis Data Pegawai untuk Manajemen Sumber Daya Manusia yang disediakan. Padahal seperti yang kita ketahui sebuah sistem dan *software*/rancangan yang secanggih apa pun tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis teknologi dengan penggunaan komputer yang serba canggih.
- 3) SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki *software* untuk aplikasi Sistem Pendukung Keputusan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, di mana sekolah masih mengandalkan jasa dari perusahaan pembuat *software* dari pihak luar. Hal ini disebabkan sekolah belum memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk bidang tersebut.

Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mempersulit pimpinan dalam mengambil keputusan terutama dalam memperoleh Sistem Pendukung Keputusan yang pada tepat waktunya, yang pada akhirnya akan menghambat Kinerja Kepala Sekolah.

Di samping itu, beberapa kondisi nyata mengenai Kinerja Kepala Sekolah di kabupaten Bandung Barat, teridentifikasi beberapa masalah yang berhubungan dengan Perencanaan Strategis, Sistem Pendukung Keputusan dan Kinerja Kepala Sekolah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya Kinerja Kepala Sekolah; ditunjukkan dengan masih rendahnya hasil prestasi belajar siswa yang masih dibawah Keriteria Ketuntasan.
- 2) Belum optimalnya Sistem Informasi Keputusan; ditunjukkan dengan masih rendahnya pemahaman guru dan personil sekolah lainnya dalam mengaplikasi kesesuaian program-program kegiatan dengan tujuan sekolah secara merata.
- 3) Masih rendahnya kualitas Perencanaan Strategis sekolah dalam meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah
- 4) Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pendukung Keputusan Sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah menuju sekolah yang efektif.
- 5) Belum adanya kesesuaian yang jelas antara Perencanaan Strategis sekolah dengan pelaksanaan Program kerja di sekolah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Kinerja Kepala Sekolah dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk menguji ”Seberapa besar pengaruh perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Kinerja Kepala Sekolah (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat”.

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dideskripsikan dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Deskripsi Perencanaan Strategis pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat ?
- 2) Bagaimana Deskripsi Sistem Pendukung Keputusan pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Bagaimana Deskripsi Kinerja Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat ?
- 4) Seberapa besar pengaruh perencanaan strategis terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat?
- 5) Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat?
- 6) Seberapa besar pengaruh perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan

terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menguji:

- a. Pengaruh perencanaan strategis terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Pengaruh pelaksanaan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Pengaruh perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- b. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan dalam kajian ilmu manajemen pendidikan melalui pengelolaan manajemen sumberdaya manusia sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan dalam penelitian sumber daya manusia yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia
- d. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan program kerja sekolah bagi seluruh *stakeholders* dan komite sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui perilaku organisasi, kemampuan dan motivasi guru terhadap produktivitas guru
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah khususnya SMA-SMA di Kabupaten Bandung Barat melalui perubahan Perencanaan Strategis dan Sistem Pendukung Keputusan sebagai tolok ukur Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak.

E. Anggapan dasar

Perencanaan strategis adalah sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi berpikir dan bertindak secara strategis melalui pembentukan konsensus. Perencanaan ini merupakan usaha yang penuh disiplin untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang membentuk dan mengarahkan organisasi menjawab pertanyaan apa itu organisasi, apa kegiatannya, latar belakang dan cara bagaimana organisasi ini melakukan kegiatannya.

Perencanaan strategis akan jelas mendefinisikan tujuan didirikannya organisasi, target organisasi yang realistis, sasaran kegiatan yang konsisten dengan

misi dan visinya dalam kerangka waktu yang ditetapkan, dan juga mengidentifikasi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis berfokus pada masa depan dengan perhatian utama pada adaptasi atas lingkungan yang senantiasa berubah. Semakin banyak perubahan lingkungan semakin sering proses perencanaan ditinjau-ulang.

Secara teoretis, perencanaan strategis didefinisikan sebagai suatu upaya disiplin dalam menghasilkan keputusan-keputusan fundamental serta tindakan-tindakan yang membentuk arah suatu organisasi (Bryson, 1988). Dikatakan sebagai suatu upaya disiplin, karena dalam pelaksanaannya mulai dari perumusan penyusunan, implementasi hingga pengendalian mengandung konsistensi dalam a) pola berpikir strategis, b) dikaitkan dengan arah masa depan, c) keputusan yang dibuat mengandung konsekuensi masa depan, d) mengembangkan suatu basis yang koheren, e) kebijakan yang maksimum pada area-area dalam kontrol organisasi, f) memecahkan masalah-masalah utama organisasi, g) meningkatkan kinerja, h) berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, dan i) mengembangkan kerja tim dan meningkatkan keahlian (Bryson dan Einsweiler, 1988)

Dalam konteks dimensi-dimensi tersebut, perencanaan strategis oleh Wheleen & Hunger (1998) dinyatakan sebagai manajemen strategis yang didefinisikan sebagai seperangkat keputusan-keputusan manajerial serta tindakan-tindakan yang menetapkan kinerja jangka panjang dari perusahaan yang terdiri dari

environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, dan evaluation and control.

Perencanaan strategis sebagai referensi utama dalam suatu institusi pendidikan sudah seharusnya menjadi acuan bagi level fungsional. Semakin konsisten sebuah sekolah terhadap strategi dan kebijakan yang dibuatnya, maka deviasi Kinerja Kepala Sekolah tersebut semakin kecil. Sebaliknya semakin tidak konsisten sekolah tersebut terhadap perencanaan strategis maka varian antara sasaran kinerja dan realisasi kinerja yang dicapai semakin besar yang akhirnya akan terakumulasikan dalam Kinerja Kepala Sekolah semakin buruk. Hal ini sesuai dengan pendapat Wheelen dan Hunger (1998) yang menyatakan terdapatnya korelasi positif antara perencanaan strategis dengan kinerja organisasi.

Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien apabila ditunjang dengan penggunaan Sistem Pendukung Keputusan sebagai salah satu bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi atau perancangan bagi rangkaian alternatif tindakan, memutuskan untuk memilih tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia melalui pengolahan informasi berbasis komputer termasuk di dalamnya sistem yang berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan melalui langkah-langkah yang sistematis mulai dari pengenalan persoalan atau kebutuhan, pengumpulan dan analisis data yang relevan, sampai pada pemilihan alternatif terbaik untuk selanjutnya dilaksanakan pengambilan keputusan. Dengan perencanaan strategis berbasis Sistem Pendukung Keputusan, akan tercapai Kinerja Kepala Sekolah sebagai gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

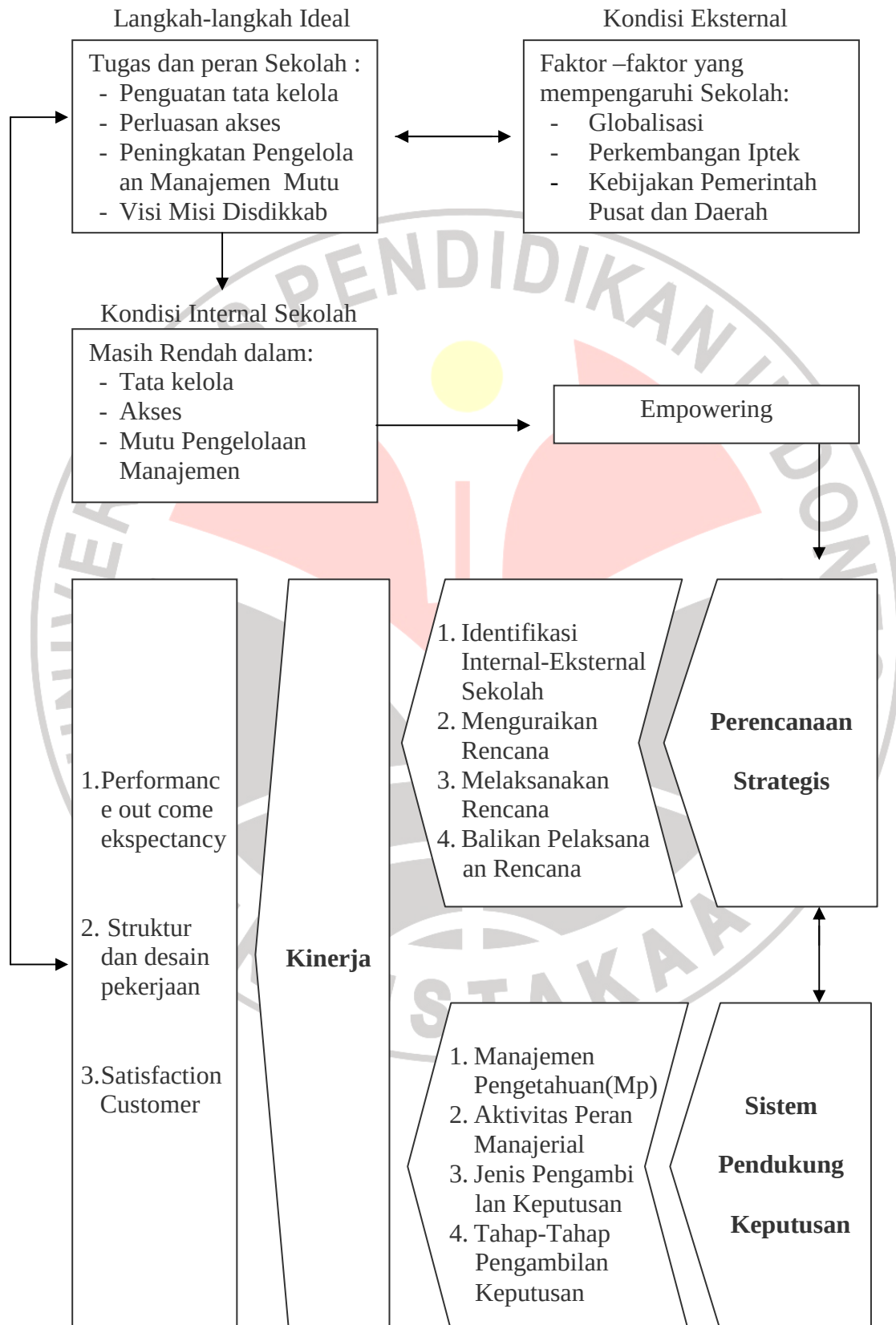
F. Hipotesis

Good dan scates (1954) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Sementara itu Trealese (1960) memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan semnatar dari suatu fakta yang dapat diamati. Hal serupa juga dinyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel (Kerlinger,1973)

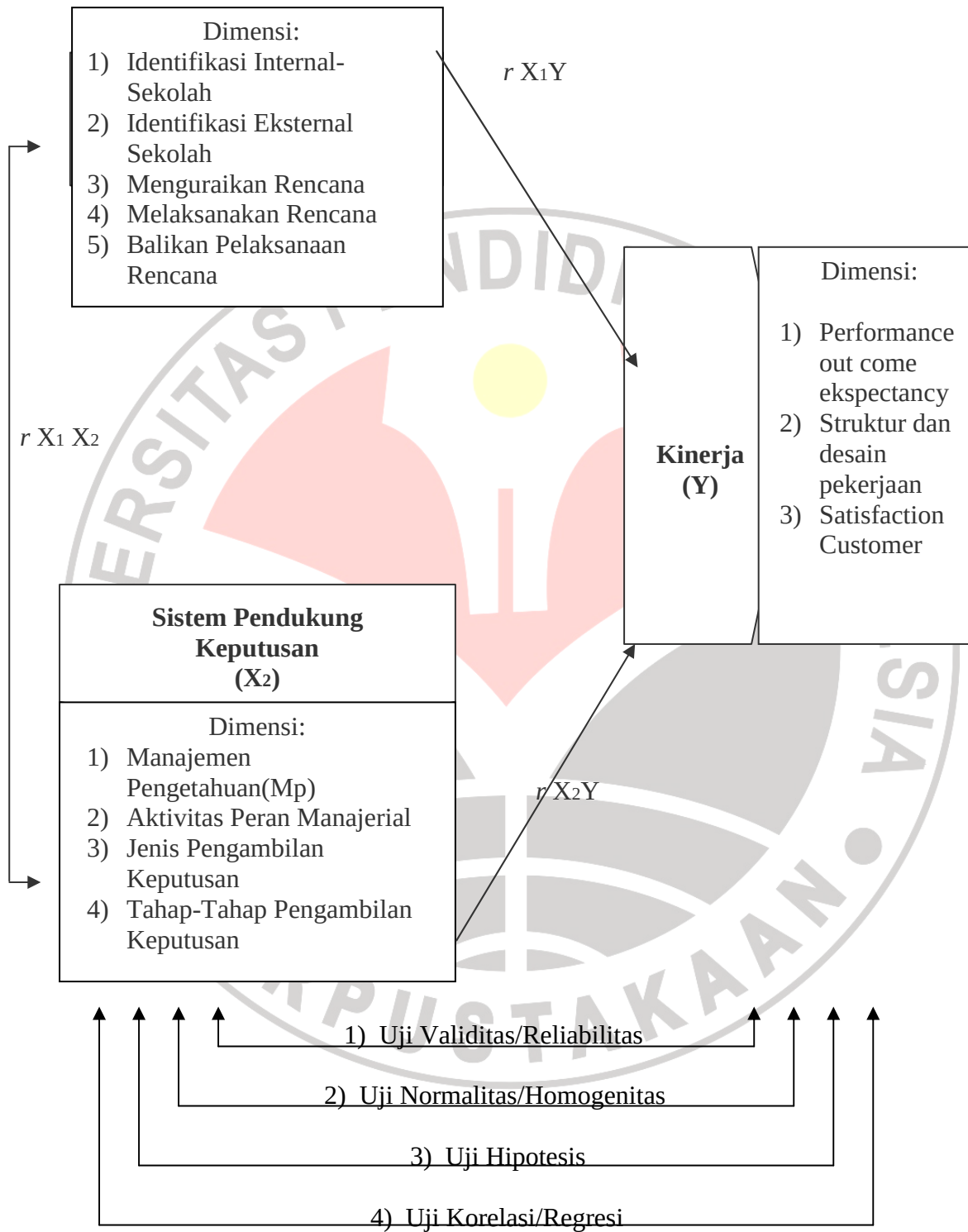
Berdasarkan anggapan dasart dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Sistem Pendukung Keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Perencanaan strategis dan Sistem Pendukung Keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bandung Barat.

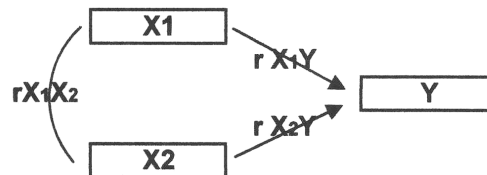
KERANGKA PIKIR



DESAIN PENELITIAN



Desain Penelitian X_1 X_2 , dan Y



Gambar 1

Keterangan :

X_1 = PERENCANAAN STRATEJIK (variabel bebas)

X_2 = SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (variabel bebas)

Z = KINERJA KEPALA SEKOLAH (variabel terikat)

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan korelasional. Dengan mengutip pendapat Nazir, metode penelitian deskriptif didefinisikan, sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. (Nazir, 1999: 63)

Nazir menambahkan pendapat Whitney, mengenai metode penelitian deskriptif ini, sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.” (Whitney dalam Nazir, 1999: 64)

2. Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan populasi penelitian adalah guru-guru di tiga SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat, yang aktif mengajar hingga periode penelitian ini berlangsung. Data lokasi sekolah dan jumlah guru yang menjadi populasi penelitian tersaji dalam Tabel 1.1 berikut ini.

TABEL 1.1

DATA LOKASI DAN POPULASI PENELITIAN

No.	Nama Sekolah	Jumlah Populasi
1.	SMA Negeri Cisarua	77 guru
2.	SMA Negeri Batujajar	42 guru
3.	SMA Negeri gamprah	32 guru
	Total	151 guru